

**BAB III**  
**RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH**  
**DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

**3.1. Arah Kebijakan Ekonomian Daerah**

**3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 2011 dan Perkiraan Tahun 2012**

**3.1.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011**

Pembangunan disegala bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur bersama masyarakat, utamanya bidang ekonomi semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat perolehan besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000 (lihat table 3.1). Pada tahun 2009 PDRB Jawa Timur sebesar Rp. 686,85 triliun, tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 778,56 triliun, dan tahun 2011 meningkat kembali menjadi Rp. 884,14 triliun. Nilai PDRB yang dihasilkan tersebut masih mengandung pengaruh perubahan harga, sehingga belum bisa digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan 2000, karena pertumbuhan ekonomi ini benar-benar diakibatkan oleh perubahan jumlah nilai produk barang dan jasa yang sudah bebas dari pengaruh harga (pertumbuhan riil).

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 perekonomian Jawa Timur mampu tumbuh 5,01 %, kemudian pada tahun 2010 dan tahun 2011 masing mengalami pertumbuhan sebesar 6,68 % dan 7,22 %.

**Tabel 3.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur**  
**Tahun 2007 - 2011**

<b>Keterangan</b>	<b>2009</b>	<b>2010<sup>*)</sup></b>	<b>2011<sup>**)</sup></b>
(1)	(4)	(5)	(6)
1. PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	686.848	778.566	884.144
2. PDRB ADHK 2000 (Miliar Rupiah)	320.861	342.281	366.984
3. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,01	6,68	7,22

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan : \*) Angka Diperbaiki

\*\*) Angka Sementara

Dampak Krisis Keuangan Global yang terjadi pada akhir tahun 2008 terus berlanjut hingga tahun 2009, ekspor beberapa komoditi unggulan Jawa Timur khususnya ke negara-negara Amerika dan Eropa ikut merosot, dan berakibat

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2009 terus melambat dengan hanya tumbuh sebesar 5,01 %.

Memasuki tahun 2010, perekonomian Jawa Timur mulai menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, sebagai dampak dari mulai membaiknya perekonomian global khususnya di wilayah Asia yang mendorong naiknya ekspor Jawa Timur, baik ke luar negeri atau ke luar daerah. Dengan kondisi yang kondusif tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2010 dan tahun 2011 mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi masing-masing sebesar 6,68 % dan 7,22 %, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

### Pertumbuhan Sektoral

Pada tahun 2009 perekonomian Jawa Timur hanya mampu tumbuh sebesar 5,01 %, karena dampak krisis ekonomi masih berlanjut. Beberapa ekspor andalan Jawa Timur keluar negeri merosot tajam. Namun demikian, tercatat beberapa sektor masih mengalami pertumbuhan tinggi, yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor pertambangan dan penggalian, sektor jasa-jasa masing-masing tumbuh sebesar 12,98%, 6,92%, dan 5,76%. Sektor-sektor andalan Jawa Timur seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian masing-masing hanya tumbuh sebesar 5,58%, 2,80% dan 3,92%. Sementara sektor lainnya rata-rata masih tumbuh pada level 2 sampai 4 %.

Tabel 3.2  
Pertumbuhan PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000  
Tahun 2007-2011 (%)

Sektor	2007	2008	2009	2010 <sup>*)</sup>	2011 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	3,14	3,12	3,92	2,23	2,53
2. Pertambangan & Penggalian	10,35	9,31	6,92	9,18	6,08
3. Industri Pengolahan	4,77	4,36	2,80	4,32	6,06
4. Listrik, Gas & Air Bersih	13,70	3,00	2,72	6,43	6,25
5. Konstruksi	1,21	2,71	4,25	6,64	9,12
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	8,39	8,07	5,58	10,67	9,81
7. Pengangkutan & Komunikasi	7,83	8,98	12,98	10,07	11,44
8. Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan	8,40	8,05	5,30	7,27	8,18
9. Jasa-jasa	5,77	6,32	5,76	4,34	5,08
<b>PDRB</b>	<b>6,11</b>	<b>5,94</b>	<b>5,01</b>	<b>6,68</b>	<b>7,22</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur  
Keterangan : \*) Angka Diperbaiki  
\*\*) Angka Sementara

Memasuki tahun 2010, perekonomian Jawa Timur membaik seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global khususnya kawasan Asia, sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 6,68 %. Tingginya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ini terutama didukung oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tumbuh sebesar 10,67 %. Membaiknya kondisi perekonomian global memberi dampak terhadap membaiknya daya beli masyarakat yang mendorong sektor perdagangan, baik perdagangan luar negeri maupun perdagangan antar wilayah. Sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan tercatat mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, masing-masing sebesar 10,07 %, 9,18 %, dan 7,27 %. Sementara itu, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian tumbuh masing-masing sebesar 4,35 % dan 2,13 %. Situasi dan kondisi perekonomian yang cukup kondusif tersebut juga berkelanjutan di tahun 2011, sehingga Jawa Timur mengalami pertumbuhan sebesar 7,22 %.

#### **Distribusi PDRB Menurut Penggunaan**

Tidak berbeda dengan nilai PDRB Sektoral, untuk sementara dari hasil penghitungan nilai total PDRB menurut penggunaan tahun 2011 mencapai Rp. 884,14 triliun. Jika dilihat per-komponen, strukturnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Komponen konsumsi rumah tangga selalu berada pada urutan pertama dengan capaian sebesar 67,46% atau sekitar Rp. 596,41 triliun dengan rincian konsumsi makanan Rp. 338,07 triliun sedangkan konsumsi non makanan mencapai Rp. 258,34 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kondisi ini lebih tinggi karena pada tahun 2010 capaiannya hanya sekitar 66,35 % dengan komposisi untuk konsumsi makanan sebesar 38,10 % dan untuk non makanan 28,25 %.

PDRB Penggunaan terbagi dalam tujuh komponen. Salah satu komponen dengan urutan terbesar kedua yang membentuk PDRB Penggunaan adalah ekspor dan impor. Transaksi ekspor menggambarkan berbagai macam produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik tetapi dikonsumsi oleh pihak negara dan propinsi lain. Sementara impor menggambarkan tentang adanya tambahan penyediaan produk (*supply*) di wilayah ekonomi domestik. Impor juga terdiri dari berbagai macam produk barang dan jasa. Tidak berbeda jauh dengan ekspor, impor barang dan jasa juga berasal dari produk luar negeri maupun provinsi lain. Impor bukan merupakan produk yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi domestik, oleh karena itu impor harus

dikeluarkan dari perhitungan PDRB. Dengan demikian, maka PDRB akan menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh Jawa Timur.

Nilai ekspor pada tahun 2011 mengalami peningkatan sejalan dengan semakin bertambahnya permintaan pasar luar negeri terhadap produk-produk barang maupun jasa yang ada di wilayah Jawa Timur, seperti digambarkan pada Tabel 3.5. Pada tahun 2011 kontribusinya mencapai 49,76% atau sekitar Rp. 439,97 triliun, sedangkan pada tahun 2010 kontribusinya sebesar 48,19% atau Rp. 375,18 triliun. Sementara untuk perkembangan yang terjadi pada transaksi impor memperlihatkan semakin kuatnya ketergantungan Jawa Timur terhadap produk-produk dari negara dan provinsi lain. Pada tahun 2011 kontribusi impor mencapai 45,85 % atau sekitar Rp. 405,40 triliun, sedangkan pada tahun 2010 sebesar 43,69 % atau Rp. 340,14 triliun. Tingginya peran ekspor dan impor dalam perekonomian Jawa Timur dimungkinkan Provinsi Jawa Timur merupakan pusat industri dan perdagangan di kawasan wilayah Indonesia Timur.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan inventori merupakan variabel yang bisa digunakan untuk menghitung besarnya investasi yang ditanam. Pada tahun 2011 investasi yang terserap di Jawa Timur tercatat sebesar Rp. 174,31 triliun (19,71 % dari total PDRB) dan perubahan inventori sebesar Rp. 5,79 triliun (0,66 %). Investasi berguna untuk memompa kapasitas dari unit kegiatan ekonomi yang belum terpakai secara optimal.

Komponen konsumsi akhir pemerintah mencakup berbagai pengeluaran pemerintah baik dari hasil produksi domestik maupun impor. Tahun 2011 konsumsi akhir pemerintah mencapai Rp. 67,27 triliun, artinya dari total PDRB Jawa Timur sebesar 7,61 % digunakan untuk konsumsi pemerintah. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah mencapai 7,54 % atau sebesar Rp. 58,68 triliun. Sebagai regulator, yang utama bukan dilihat dari besarnya dana yang dikonsumsi pemerintah, justru yang lebih penting adalah seberapa efisien dana tersebut mendorong perekonomian di Jawa Timur.

Kinerja investasi baik investasi non fasilitas maupun fasilitas baik PMA maupun PMDN baik kinerja ijin prinsip maupun realisasi investasi mengalami pertumbuhan yang signifikan. Ijin Prinsip, untuk Investasi PMA tahun 2010 sebesar Rp. 18,45 trilyun, pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 44,68 triliun, sedangkan PMDN tahun 2010 sebesar Rp. 41,01 trilyun, tahun 2011 mencapai Rp. 26,50 trilyun. Sedangkan realisasi Investasi, untuk investasi non fasilitas tahun 2010 sebesar Rp. 56,26 trilyun, tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 70,07 trilyun, PMA tahun 2010 sebesar Rp. 16,73 trilyun, tahun 2011 meningkat

menjadi Rp. 20,07 triliun dan PMDN tahun 2010 sebesar Rp. 9,59 triliun, tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 20,33 triliun. Secara total, kinerja ijin prinsip tahun 2010 sebesar Rp. 59,46 triliun, tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 71,18 triliun dan realisasi investasi tahun 2010 sebesar Rp. 82,58 triliun, tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 110,47 triliun.

Kinerja perdagangan mengalami surplus sebesar Rp. 34,58 triliun rupiah. Kinerja Ekspor, untuk ekspor keluar provinsi sebesar Rp. 239,47 triliun dan ekspor ke luar negeri sebesar Rp. 200,5 triliun, sehingga total ekspor tahun 2011 sebesar Rp. 439,97 triliun atau naik 17,27 % dari tahun 2010. Kinerja Impor, untuk impor dari luar provinsi Rp. 208,75 triliun dan impor dari luar negeri Rp. 196,64 triliun, sehingga total impor tahun 2011 sebesar Rp. 405,39 triliun atau naik 19,18 % dari tahun 2010.

Struktur impor pada tahun 2011 adalah 83,88 % merupakan bahan baku/penolong, 8,69 % barang modal dan 7,43 % merupakan barang konsumsi. Dari struktur dimaksud, pada tahun mendatang akan terjadi proses *value added* dari pengolahan impor bahan baku maupun penolong dari proses industrialisasi di Jawa Timur. Dengan demikian, kedepan akan terjadi peningkatan nilai tambah bruto dalam konteks pertumbuhan PDRB. Tentu dapat kita pahami bersama, bahwa kinerja dimaksud bukan hanya kinerja Pemerintah Provinsi, namun dengan strategi pertumbuhan dan sumberdaya terbatas, fokus pembangunan ekonomi diarahkan pada sektor ekonomi produktif khususnya untuk pelaku UMKM maupun dukungan pembangunan infrastruktur yang sampai saat ini terus kita upayakan percepatan penyelesaiannya.

### **3.1.1.2. Proyeksi Makro Ekonomi Jawa Timur Tahun 2012**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2012 adalah 5,5%-6,0%. Pertumbuhan tersebut optimis dapat tercapai dan diperkirakan mencapai 7,3%-7,5%, mengingat kondisi eksternal (global) dan internal, baik nasional maupun regional cukup kondusif.

#### **1. Lingkungan eksternal (Global)**

**Pertama,** Kecenderungan kondisi perekonomian global mulai menunjukkan adanya perkembangan terutama paska krisis hutang Uni Eropa dan Amerika dengan kebijakan-kebijakan/solusi politik penyelesaian krisis keuangannya. Meski demikian diprediksi

perekonomian di AS mulai tumbuh walau masih kecil sehingga berpengaruh pada arus modal dan perdagangan dunia yang melambat..

**Kedua**, Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berpengaruh terhadap kenaikan harga minyak dunia, juga akan berpengaruh terhadap kenaikan harga komoditi lainnya.

Hal ini menuntut perekonomian dengan sumber pertumbuhan yang meluas serta terbangunnya Ketahanan Pangan dan Energi Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) akan diimplementasikan tahun 2015, yang akan mempengaruhi kinerja perekonomian Jawa Timur, sehingga harus meningkatkan daya saing guna menghadapi integrasi perekonomian dan meningkatkan potensi pasar domestik dan mendorong daya saing produk daerah di pasar domestik maupun luar negeri.

## 2. Lingkungan Internal (Nasional)

**Pertama**, Kutub pertumbuhan ekonomi dunia mulai bergeser ke Kawasan Asia yang berimbas pada peringkat Indonesia naik grade "LAYAK INVESTASI". Diperkirakan iklim investasi di Indonesia akan semakin berkembang seiring dengan perubahan regulasi penanaman modal yang semakin memudahkan tumbuhnya investasi sehingga lack investasi akan semakin mengecil dan realisasi investasi akan semakin membesar.

**Kedua**, Perkembangan makro ekonomi nasional menunjukkan hal yang optimis ditengah perbaikan pengaruh krisis eksternal. Beberapa indikator ekonomi utama, seperti neraca pembayaran, nilai tukar, tingkat inflasi, dan kinerja pasar modal, menunjukkan perkembangan yang baik. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir Indonesia merupakan sedikit dari negara Asia yang secara konsisten dapat membukukan pertumbuhan ekonomi positif yang ditandai dengan redesign target pertumbuhan China dan Jepang. Tren tersebut berpengaruh pada perubahan asumsi dasar APBN Perubahan tahun 2012 diantaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5%; Nilai Tukar terhadap US\$ sebesar Rp. 9.000; Asumsi lifting minyak menjadi 930.000 barel; Harga Minyak sebesar US \$ 105 per barel; Suku bunga SPN 3 bulan menjadi 5% dan inflasi sebesar 6,8%.

**Ketiga**, Master Plan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Indonesia (MP3EI) merupakan *blue print* ekonomi nasional yang diharapkan akan mendorong percepatan kinerja ekonomi Jawa Timur dengan kegiatan ekonomi utama (a) Industri Makanan dan Minuman, (b) Industri Perkapalan, (c) Industri Alutsista, (d) Industri telematika, (e) Industri Migas serta (f) infrastruktur.

### 3. Lingkungan Internal (Provinsi)

**Pertama**, Indikator makro ekonomi menunjukkan kecenderungan yang semakin baik sejak pertumbuhan Jawa Timur tahun 2009 sebesar 5,10% yang melebihi nasional sebesar 4,5%, kemudian di Tahun 2010 tumbuh 6,68% juga melebihi nasional sebesar 6,10%. Pada tahun 2011 perekonomian Jawa Timur meningkat sebesar 7,22% tahun 2010 (c-to-c). Kinerja tersebut menjadi kondusif, ketika inflasi pada tahun 2011 berada pada posisi kondusif 4,09%.

**Kedua**, Berbagai kerangka regulasi yang menjadi stimulan dalam percepatan ekonomi di Jawa Timur antara lain :

- a. Jaminan investasi pemerintah provinsi baik dalam hal (a) iklim perburuhan yang demokratis, (b) surplus energi listrik, (c) fasilitasi pengadaan tanah untuk investor dan (d) pelayanan perijinan satu pintu (PTSP) oleh UPT P2T akan mampu mempercepat Direct Investment baik domestik maupun Asing.
- b. Sistem kapitasi yang berpihak pemberdayaan sektor riil, koperasi dan UMKM, yang diindikasikan dengan (a) tuntasnya pembentukan lembaga keuangan mikro pedesaan/kelurahan sebanyak 8.506 koperasi wanita sampai dengan tahun 2010 dan direncanakan penambahan modal kembali terhadap 2.000 kopwan berprestasi, LMDH, Koppontren dan Koperasi Karyawan sebesar 1000 unit, (b) linkage program Bank Jatim-BPR, (c) penyaluran kredit murah melalui dana bergulir dengan bunga 6%, (d) penjaminan kredit bagi UMKM yang layak namun kurang memenuhi prinsip kehati-hatian perbankan melalui BUMD Provinsi Jawa Timur, yaitu PT Jamkrida.

**Ketiga**, Percepatan berbagai pembangunan infrastruktur, antara lain:

- a. Pembangunan jalan akses menuju pelabuhan di Socah Bangkalan.
- b. Tahap penyelesaian persoalan di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), termasuk pembentukan kelembagaan pengelolaan APBS.

- c. Optimalisasi bandara Internasional Juanda (pemanfaatan bandara lama untuk menampung frekuensi penerbangan yang sudah berada pada posisi overload).
- d. Percepatan pembangunan Jalan Lintas Selatan Ruas Malang Pacitan.
- e. Peningkatan dan pemeliharaan jalan Provinsi.
- f. Beroperasinya jalan alternatif pengganti arteri Porong .
- g. Percepatan penyelesaian jalur tol alternatif pengganti tol yang terkena bencana lumpur lapindo.
- h. Mendorong percepatan penyelesaian ruas-ruas tol, diantaranya tol Surabaya-Mojokerto.
- i. Optimalisasi fungsi pasar induk Puspa Agro diharapkan akan menginduksi sektor produksi untuk memacu produksi dan produktivitas maupun nilai tambah bruto di sektor perdagangan agro.

**Keempat,** Sistem kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak baik dengan berbagai skema antara lain :

- a. Kerjasama domestik untuk membantu penetrasi perdagangan dalam negeri melalui pembukaan 24 Perwakilan dagang di 24 Provinsi.
- b. Kerjasama sister province maupun non sister province untuk tujuan capital inflow maupun memperluas pasar ekspor ke negara potensial maupun negara non konvensional.

MOU dengan BUMN dan Perusahaan Swasta Nasional /Internasional dalam hal optimalisasi pemanfaatan dana CSR/PKBL.

### **3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014**

#### **3.1.2.1. Tantangan Perekonomian 2013 dan 2014**

Dengan kemajuan perekonomian yang dicapai pada tahun 2011 dan masalah yang diperkirakan dihadapi pada tahun 2012, maka tantangan pokok yang akan dihadapi pada tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:

##### *1. Penciptaan Lapangan Kerja Untuk Pengurangan Pengangguran*

Pertumbuhan angkatan kerja baru akan menjadi tantangan kinerja ekonomi. Dengan dominasi ekonomi di sektor konsumsi, kinerja ekonomi kedepan diharapkan akan mampu didukung oleh pertumbuhan



pembentukan modal tetap bruto serta net ekspor yang signifikan untuk dapat mengatasi pertumbuhan angkatan kerja. Oleh karena itu kinerja perbankan, kinerja investasi (capital inflow/fresh money), percepatan pembangunan infrastruktur merupakan serangkaian faktor diharapkan sinergi untuk membangun ekonomi Jawa Timur.

2. *Kinerja Ekonomi untuk Pengurangan Kemiskinan*

Jumlah penduduk miskin Jawa Timur per September 2011 yang masih sebesar 13,85% merupakan tantangan tersendiri bagi Jawa Timur. Upaya secara kelembagaan, program dan berbagai sumber dana telah dilakukan. Secara konseptual, diharapkan implementasi pembangunan ekonomi akan mampu dalam jangka panjang menurunkan kemiskinan. Kualitas pertumbuhan yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan diharapkan akan mampu mengurangi kemiskinan.

3. *Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif*

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini merupakan tantangan cukup berat mengingat, pertumbuhan ekonomi saat ini masih digerakan oleh sektor konsumsi. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang bisa mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi pada sektor riil terutama dengan memanfaatkan mekanisme pasar modal. Selain itu, diperlukan suatu kebijakan pengembangan industri yang berorientasi kepada industri yang berbahan baku lokal serta memiliki keterkaitan kedepan dan kebelakang yang besar.

4. *Penanganan Bencana Alam.*

Kejadian Bencana Alam memang tidak dapat diprediksi (*un-predictable*), danamun bisa juga diprediksikan untuk kejadian tertentu dan kesemuanya dapat menimbulkan dampak/resiko baik sosial maupun resiko ekonomi. Ini adalah tantangan yang harus menjadi bagian penting dalam manajemen pembangunan kedepan, baik dalam manajemen pencegahan (untuk bencana tertentu yang diakibatkan oleh distorsi fungsi sumberdaya alam), manajemen penanggulangan, manajemen resiko/ dampak, maupun manajemen pemulihan dari bencana.

### 3.1.2.2. Prospek Ekonomi Tahun 2013 dan Tahun 2014

Sejak 2009 dalam koridor perencanaan RPJMD 2009-2014, hingga tahun ketiga 2011, kinerja ekonomi di Jawa Timur menunjukkan percepatan dan selalu di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,01% di atas nasional 4,5%, tahun 2010 tumbuh 6,68% di atas nasional 6,10% dan pada tahun 2011 tumbuh 7,22% di atas nasional 6,5%. Untuk tahun 2012 diperkirakan tumbuh pada kisaran sekitar 7,3 – 7,5%, sedangkan pada tahun 2013, dengan asumsi berbagai proyek infrastruktur pada tahap penyelesaian, terdapat solusi energi khususnya gas, diperkirakan ekonomi Jawa Timur akan mampu tumbuh pada kisaran 7,5-7,7%.

Struktur ekonomi Jawa Timur tahun 2013 dan 2014, jika ditinjau berdasarkan pengaruh eksternalitas krisis utang Eropa dan Amerika diperkirakan tidak banyak mengalami perubahan yang mendasar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sumber pertumbuhan masih akan ditopang oleh tiga sektor pendukung utama yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, dan sektor pertanian.

Meski mengalami gejolak akibat krisis geopolitik di Timur Tengah, dari sisi moneter tidak terjadi perubahan nilai tukar yang ekstrim, namun akan berpengaruh pada meningkatnya laju inflasi. Disisi lain kestabilan tingkat suku bunga perbankan akan mempengaruhi prospek perekonomian Jawa Timur tahun 2013 dan 2014. Dengan perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan suku bunga perbankan serta dukungan kebijakan moneter yang hati-hati, serta laju inflasi rata-rata diperkirakan pada kisaran  $5-6\% \pm 1$  per tahun, maka prospek ekonomi Jawa Timur 2013 dan 2014 akan lebih baik dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2013 diperkirakan sebesar 7,5-7,7% dan tahun 2014 diperkirakan mencapai lebih 7,7-8,0%.

Di bidang pembiayaan sektor riil, diharapkan bank-bank di Jawa Timur dapat terus meningkatkan dukungannya pada sektor riil. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri secara eksplisit telah menunjukkan keberpihakan terhadap sektor riil dengan berbagai skema pendanaan baik melalui kredit bunga rendah, penjaminan kredit kepada UMKM oleh PT Jamkrida, pembentukan lembaga keuangan mikro melalui 8.506 Koperasi Wanita, peningkatan peran KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank).

### 3.1.3. Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi Jawa Timur sebagai sub sistem pembangunan ekonomi nasional bertumpu pada 2 fondasi utama, yaitu(a) stabilitas makro baik fiskal maupun moneter, (b) sektor riil yang menjadi basis peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja di 9 sektor lapangan usaha. Kebijakan ekonomi Jawa timur tidak hanya mengejar percepatan, namun lebih diarahkan menuju pertumbuhan yang inklusif yang dibangun dari kualitas fundamental ekonomi maupun berorientasi pada pengurangan disparitas baik disparitas antar wilayah maupun disparitas pendapatan masyarakat.

Mendudukan fungsi Pemerintahan, dalam konteks membangun ekonomi akan menjadi salah satu strategi yang akan menderivasi kebijakan menjadi strategi fungsi-fungsi untuk mengoperasionalkan instrumen fiskal daerah yang kapasitasnya sangat terbatas. Dengan demikian, akan sangat fokus, bahwa kebijakan mediasi instrumen investasi publik terhadap kinerja ekonomi dengan mempertimbangkan sejauhmana sektor-sektor tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat serta target-target group masyarakat yang prioritas mendapatkan mediasi dari instrumen dari investasi publik. Klasifikasi mediasi investasi publik terhadap sektor-sektor ekonomi dapat dapat berupa fasilitasi untuk target group yang memerlukan keberpihakan dan tentu tidak dalam jangka waktu yang lterus menerus maupun stimulasi pada sektor atau target group yang memerlukan percepatan-percepatan.

Dengan konstruksi tersebut, diharapkan target pertumbuhan ekonomi akan mampu diwujudkan dan memberikan dampak terhadap kinerja penurunan pengangguran terbuka, penurunan kemiskinan, peningkatan IPM serta penurunan disparitas wilayah.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan di atas, kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada :

- a. Dibidang makro ekonomi, diarahkan agar inflasi berada pada batas kondusif  $5\% \pm 1\%$  dengan mengoptimalkan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta stimulasi berupa intervensi pasar terhadap komoditi tertentu dan situasi tertentu baik melalui subsidi ongkos angkut, operasi pasar dan kegiatan lain yang dapat menekan laju inflasi.
- b. Di bidang kerangka regulasi/kebijakan, 4 jaminan investasi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, reformasi birokrasi di bidang pelayanan perijinan, kebijakan peningkatan belanja modal termasuk belanja modal

non aset (hibah barang modal ke kelompok masyarakat), merupakan serangkaian kebijakan untuk mampu menstimulasi kinerja ekonomi.

- c. Dibidang pembiayaan sektor riil, kebijakan pembiayaan sektor riil diarahkan pada :
  - 1) Mendorong Bank Indonesia agar implementasi dibidang kebijakan moneter baik Giro Wajib Minimum, Suku Bunga Bank Referensi untuk mampu mendorong peningkatan LDR khususnya bagi sektor riil di Jawa Timur.
  - 2) Mengoptimalkan linkage PT Bank Jatim - PT BPR untuk pembiayaan sektor mikro dan kecil
  - 3) Mengoptimalkan pemanfaatan PT Jamkrida dalam hal penjaminan kredit UMKM .
- d. Di bidang Investasi, diarahkan dengan (a) mengoptimalkan promosi investasi disertai dengan dukungan 4 jaminan investasi serta percepatan pembangunan infrastruktur, (b) mendorong percepatan realisasi investasi dari ijin-ijin prinsip yang telah mendapatkan persetujuan.
- e. Di Bidang Produksi dan produktivitas sektor pertanian (a) di sektor primer pertanian dalam arti luas diarahkan untuk peningkatan produksi dan produktivitas beras, daging, gula, garam, perikanan budidaya dan tangkap menuju ketahanan pangan dan mendukung surplus 10 juta ton beras 2014 dan swasembada daging 2014 (b) peningkatan daya saing komoditi melalui pemanfaatan teknolog standar nasional/internasional, (c) mengoptimalkan kelembagaan yang mampu memberikan akses kepada kelompok tani, (d) efisiensi dan peningkatan nilai tambah usaha tani melalui fasilitasi alat mesin pertanian, (e) fasilitasi kelompok tani dalam hal mendapatkan agroinput.
- f. Di bidang Industri dan Perdagangan, diarahkan pada (a) peningkatan produksi melalui pemanfaatan kapasitas terpasang dan fasilitasi persoalan bahan baku, (b) integrasi industri prioritas daerah dengan kegiatan ekonomi utama MP3EI koridor Jawa, di Jawa timur yang fokus pada Industri Makanan dan Minuman, Industri Perkapalan, Industri Alutsista, Industri Telematika maupun refinery, (c) inisiasi pengembangan industri mesin mobil menuju kemandirian industri mobil nasional, (d) mengoptimalkan penetrasi pasar di pasar ekspor konvensional potensial maupun pasar ekspor non konvensional, serta pasar domestik di luar provinsi / antar pulau.

- g. Dibidang ekonomi kreatif, diarahkan dengan mengoptimalkan potensi melalui fasilitasi di bidang pembiayaan maupun kualitas produk serta pemasaran.
- h. Di Sektor UMKM dan Koperasi, diarahkan untuk mengoptimalkan peran UMKM terhadap PDRB dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, penciptaan wirausaha baru, mengoptimalkan kelompok-kelompok mikro: Koperasi Wanita, LMDH, Kompondren dan Koperasi Buruh/Karyawan.
- i. Di Bidang Infrastruktur dan transportasi, diarahkan untuk (a) mendukung aksesibilitas distribusi barang dan jasa (*domestik connectivity*) serta konektivitas eksternal antar pulau maupun mancanegara yang didukung oleh sistem logistik yang memadai untuk efisiensi, (b) mendukung peningkatan produksi padi melalui revitalisasi waduk di berbagai Daerah Aliran Sungai.  
Di bidang energi, diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi rumah tangga dan peningkatan produktivitas industri melalui rencana-rencana pembangunan refinery, regastrifikasi, percepatan penyelesaian pembangunan PLTU (panas bumi).

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.**

#### **3.2.1. Analisa dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah**

Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Kemampuan pemerintah dapat diukur penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan peningkatan, namun demikian peningkatan tersebut masih belum dapat mencukupi seluruh kebutuhan penyelenggaraan pembangunan di daerah. Untuk itu Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan serta daerah optimalisasi kontribusi BUMD.

Sementara sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil

yang ditransfer langsung ke daerah, serta Dana Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan yang merupakan program/kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya menghimpun Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2009 tercatat realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 6.691.922.350.214,00, tahun 2010 sebesar Rp. 8.837.303.648.090,00, tahun 2011 sebesar Rp. 10.945.365.215.819,00, dan pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 11.523.016.693.156. Selama tahun 2009-2012, Pendapatan Daerah rata-rata tumbuh sebesar 20,39% pertahun. Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur pada Tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 4.629.195.945.000,00, tahun anggaran 2010 meningkat menjadi Rp.6.376.891.252.337,00, tahun 2011 meningkat lagi menjadi sebesar Rp.8.472.186.506.965,00 dan pada tahun 2012 sebesar Rp.9.068.160.048.588,00 atau tumbuh rata-rata sebesar 25,88% per tahun. Dana Perimbangan Jawa Timur pada tahun anggaran 2009 sebesar Rp.2.049.440.405.214,00, tahun anggaran 2010 sebesar Rp.2.412.237.704.753,00, tahun 2011 meningkat menjadi Rp.2.412.568.356.854,00 dan pada tahun 2012 sebesar Rp.2.408.974.064.568,00 atau tumbuh rata-rata 5,86% per tahun. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Jawa Timur pada tahun anggaran 2009 sebesar Rp.13.286.000.000,00, tahun anggaran 2010 sebesar Rp.48.174.691.000,00, tahun 2011 sebesar Rp.60.610.352.000,00, dan pada tahun 2012 nilainya menjadi Rp.45.882.580.000,00 atau tumbuh rata-rata 88,03% per tahun.

Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya pelayanan kepada masyarakat tercermin dalam Belanja Daerah, pada tahun anggaran 2009 tercatat realisasi Belanja Daerah Jawa Timur sebesar Rp.8.395.165.214.727,00, tahun 2010 sebesar Rp.10.508.103.165.586,00, tahun 2011 sebesar Rp.12.305.791.486.188,00, dan tahun 2012 sebesar Rp.12.214.783.359.822,00. Komponen realisasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pada tahun anggaran 2009 jumlah Belanja Langsung sebesar Rp.3.616.645.679.240,00 tahun anggaran 2010 sebesar Rp.4.409.680.712.020,00, tahun anggaran 2011 sebesar Rp.6.098.422.453.566,00, dan pada tahun 2012 sebesar

Rp.5.560.715.858.363,00. Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung tahun anggaran 2009 sebesar Rp.4.778.519.535.487,00, tahun anggaran 2010 Rp.6.098.422.453.566,00, tahun anggaran 2011 menjadi sebesar Rp.6.745.075.627.825,00, sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp.6.608.154.642.841,00.

Prediksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi di Jawa Timur Tahun 2013 dari Pos Pendapatan Daerah sebesar Rp.11.941.952.723.156,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.9.487.096.078.588,00 dan prediksi penerimaan dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.2.454.856.644.568,00.

### **1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2012 diarahkan pada:

- a. Optimalisasi usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dalam rangka *taxing power* di daerah.
- b. Advokasi kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan porsi belanja transfer ke daerah baik (a) DAU yang saat ini masih didasarkan atas Asumsi Dasar (AD) jumlah PNS dan Celah Fiskal (CF) , (b) DAK, maupun (c) Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil sumber daya alam.
- c. Mengembangkan pendapatan daerah dengan meminimalkan timbulnya dampak distortif atas pengenaan pajak atau retribusi daerah terhadap perekonomian.
- d. Meningkatkan kontribusi BUMD dengan upaya pengelolaan BUMD yang lebih efisien dan efektif.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari pos PAD, berbagai upaya yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dari berbagai layanan baik melalui sistem, prosedur serta insentif dan disinsentif.
- b. Memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan Potensi Daerah.

Dengan Program/Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, peningkatan hubungan/kerjasama antar Dinas dilingkungan Provinsi Jawa Timur dan dengan Pemerintah Pusat/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah, pengembangan fasilitasi kerja sama dengan Kabupaten/

Kota dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

- c. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi.

## 2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 disusun dengan memperhatikan, mempertimbangkan potensi peluang dan dinamika permasalahan serta perkembangan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu Kebijakan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013 antara lain diarahkan pada:

- a. Fasilitasi belanja penanganan kemiskinan dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta layanan sosial dasar lainnya.
- b. Stimulasi pembangunan ekonomi baik di sektor produktif maupun sarana dan prasarana wilayah.
- c. Kebijakan transfer baik melalui *specific block grant*, hibah dan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah.
- d. Fasilitasi kegiatan – kegiatan tahun jamak (*multi years*) yang telah disetujui oleh DPRD.
- e. Pemenuhan belanja program umum (ex rutin) dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.
- f. Fasilitasi belanja tak terduga untuk kegiatan mendesak termasuk untuk penanganan bencana alam.
- g. Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun Belanja Langsung program khusus (Eks Pembangunan) serta program dan kegiatan yang dialokasikan di seluruh SKPD berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pagu Indikatif Per SKPD Tahun 2013**

No.	Usuran Pemerintahan / SKPD	Pagu Indikatif
1	2	3
	<b>URUSAN WAJIB</b>	<b>5.009.209.147.065,00</b>
<b>01</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>954.936.045.000,00</b>
1	Dinas Pendidikan Prov. Jatim	954.936.045.000,00



No.	Urusan Pemerintahan / SKPD	Pagu Indikatif
1	2	3
<b>02</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>1.383.174.939.884,00</b>
2	Dinas Kesehatan Prov. Jatim	230.711.053.000,00
3	UPT- Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Batu Prov. Jatim	20.034.195.000,00
	<i>Dana Fungsional</i>	
4	UPT- Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Jember Prov. Jatim	17.215.000.000,00
	<i>Dana Fungsional</i>	
5	UPT- Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun Prov. Jatim	7.500.000.000,00
	<i>Dana Fungsional</i>	
6	UPT- Rumah Sakit Khusus Kusta Kediri Prov. Jatim	7.523.533.000,00
	<i>Dana Fungsional</i>	
7	UPT- Rumah Sakit Khusus Kusta Sumberglagah Mojokerto Prov. Jatim	22.531.326.000,00
	<i>Dana Fungsional</i>	
8	UPT- Balai Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya	16.400.000.000,00
	<i>Dana Fungsional</i>	
9	UPT- Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Surabaya	18.915.391.000,00
	<i>Dana Fungsional</i>	
10	UPT- Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Pamekasan	8.500.000.000,00
	<i>Dana Fungsional</i>	
11	UPT- Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Madiun	15.987.275.000,00
	<i>Dana Fungsional</i>	
12	Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya Prov. Jatim	567.070.143.174,00
	<i>Dana Fungsional</i>	
13	Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang Prov. Jatim	252.929.171.600,00
	<i>Dana Fungsional</i>	
14	Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun Prov. Jatim	83.708.841.110,00
	<i>Dana Fungsional</i>	
15	Rumah Sakit Haji Surabaya Prov. Jatim	85.613.011.000,00
	<i>Dana Fungsional</i>	
16	Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Prov. Jatim	28.536.000.000,00
	<i>Dana Fungsional</i>	
<b>03</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>	<b>780.800.977.000,00</b>
17	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim	480.500.000.000,00
18	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prov. Jatim	161.531.650.000,00
19	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim	138.769.327.000,00
<b>06</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>	<b>76.580.000.000,00</b>
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jatim	76.580.000.000,00
<b>07</b>	<b>Perhubungan</b>	<b>191.034.536.000,00</b>
21	Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan	191.034.536.000,00

No.	Urusan Pemerintahan / SKPD	Pagu Indikatif
1	2	3
<b>08</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>29.247.000.000,00</b>
	22 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim	29.247.000.000,00
<b>11</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>14.743.650.000,00</b>
	23 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim	14.743.650.000,00
<b>13</b>	<b>Sosial</b>	<b>80.290.689.000,00</b>
	24 Dinas Sosial Prov. Jatim	80.290.689.000,00
<b>14</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>	<b>110.024.838.283,00</b>
	25 Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim	110.024.838.283,00
<b>15</b>	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>	<b>146.179.225.000,00</b>
	26 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim	146.179.225.000,00
<b>16</b>	<b>Penanaman Modal Daerah</b>	<b>43.227.566.298,00</b>
	27 Badan Penanaman Modal Prov. Jatim	43.227.566.298,00
<b>17</b>	<b>Kebudayaan</b>	<b>81.052.395.000,00</b>
	28 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	81.052.395.000,00
<b>18</b>	<b>Kepemudaan dan Keolahragaan</b>	<b>35.623.300.000,00</b>
	29 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim	35.623.300.000,00
<b>19</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>	<b>49.394.084.000,00</b>
	30 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jatim	16.573.523.000,00
	31 Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim	14.300.000.000,00
	32 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.642.700.000,00
	33 Pelaksana Harian Badan Narkotika	6.877.861.000,00
<b>20</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>	<b>888.240.509.600,00</b>
	34 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Jatim	
	35 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	36 Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim	13.670.000.000,00
	37 Biro Administrasi Kerjasama Setda Prov. Jatim	16.875.000.000,00
	38 Biro Hukum Setda Prov. Jatim	6.525.000.000,00
	39 Biro Administrasi Perekonomian Setda Prov. Jatim	30.645.800.000,00
	40 Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jatim	16.050.000.000,00
	41 Biro Administrasi Sumber Daya Alam Setda Prov. Jatim	8.535.000.000,00
	42 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jatim	16.572.319.000,00
	43 Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim	17.603.773.000,00
	44 Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Jatim	17.458.480.000,00

No.	Urusan Pemerintahan / SKPD	Pagu Indikatif
1	2	3
45	Biro Organisasi Setda Prov. Jatim	10.800.000.000,00
46	Biro Umum Setda Prov. Jatim	62.293.305.100,00
47	Sekretariat DPRD Prov. Jatim	147.523.102.000,00
48	Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Jatim	14.700.000.000,00
49	Inspektorat Provinsi Jatim	18.900.000.000,00
50	Dinas Pendapatan Prov. Jatim	278.731.878.500,00
51	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	59.950.000.000,00
52	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	0,00
53	Kantor Perwakilan Prov. Jatim	12.500.000.000,00
54	Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim Wilayah I Madiun	5.047.836.000,00
55	Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim Wilayah II Bojonegoro	5.067.000.000,00
56	Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim Wilayah III Malang	5.107.000.000,00
57	Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim Wilayah IV Pamekasan	5.350.000.000,00
58	Badan Kepegawaian Daerah	18.445.664.000,00
59	Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Jatim	88.489.352.000,00
	<i>Belanja Pendidikan dan Pelatihan</i>	0,00
60	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi	11.400.000.000,00
<b>21</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>	<b>38.875.000.000,00</b>
61	Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim	38.875.000.000,00
<b>22</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>49.939.392.000,00</b>
62	Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov. Jatim	49.939.392.000,00
<b>25</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<b>34.295.000.000,00</b>
63	Dinas Komunikasi dan Informatika	28.805.000.000,00
64	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	5.490.000.000,00
<b>26</b>	<b>Perpustakaan</b>	<b>21.550.000.000,00</b>
65	Badan Perpustakaan dan Kearsipan	21.550.000.000,00
	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>857.451.878.250,00</b>
<b>01</b>	<b>Pertanian</b>	<b>434.454.981.000,00</b>
66	Dinas Pertanian Prov. Jatim	174.217.981.000,00
67	Dinas Perkebunan Prov. Jatim	71.054.500.000,00
68	Dinas Peternakan Prov. Jatim	189.182.500.000,00
<b>02</b>	<b>Kehutanan</b>	<b>27.880.545.250,00</b>
69	Dinas Kehutanan Prov. Jatim	27.880.545.250,00
<b>03</b>	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>	<b>22.350.000.000,00</b>
70	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim	22.350.000.000,00

No.	Urusan Pemerintahan / SKPD		Pagu Indikatif
1	2		3
<b>05</b>		<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>189.783.258.000,00</b>
	71	Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim	189.783.258.000,00
<b>07</b>		<b>Perindustrian</b>	<b>182.983.094.000,00</b>
	72	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim	182.983.094.000,00
		<b>J U M L A H</b>	<b>5.866.661.025.315,00</b>

### 3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas dengan strategi:

- a. Apabila APBD surplus maka harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sedangkan pinjaman kepada Pemerintah Pusat /Daerah lain dan/atau pendanaan belanja diutamakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian peningkatan jaminan sosial ;
- b. Apabila APBD Defisit, maka dapat ditutupi dari penerimaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah ;
- c. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman daerah dengan memperhatikan persyaratan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

#### 3.2.2. Kebijakan Sumber Pembiayaan Daerah Non Publik

Pembiayaan daerah untuk pelaksanaan pembangunan diarahkan pada:

1. Optimalisasi Lembaga Bank dan Non Bank
  - a. Optimalisasi linkage PT Bank Jatim dengan PT BPR untuk pendanaan sektor UMKM.
  - b. Pemanfaatan penjaminan kredit UMKM oleh PT Jamkrida.
  - c. Optimalisasi penyaluran pinjaman dari dan abergulir bunga 6%.
  - d. Mengoptimalkan kinerja 8.506 Koperasi Wanita untuk pembiayaan mikro pedesaan dan kelurahan dan KSP-KSP yang sehat.

- e. Mendorong Bank Indonesia agar Bank Pelaksana mampu meningkatkan LDR sebagaimana dipersyaratkan pada kebijakan Bank Indonesia dalam hal Giro Wajib Minimum (GWM) untuk pembiayaan sektor riil di Jawa Timur.
2. Mengembangkan kelembagaan Kemitraan (Partnership)
- a. Pembiayaan di sektor-sektor potensial melalui skema BOT, *Leasing* maupun *Public Private Partnership*.
  - b. Sinkronisasi dengan BUMN, BUMD, Swasta dalam hal pemanfaatan CSR /PKBL.
  - c. Introduksi pembiayaan pembangunan hibah-hibah negara donor tanpa syarat.
  - d. Untuk mengurangi beban APBD, pembiayaan BUMD diarahkan agar memiliki kemandirian pendanaan baik melalui Initial Public Offering (IPO)/ Public Service Obligation (PSO).